JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Ulfa[1*], Felmi D. Lantowa[2], Lukfiah Irwan Radjak[3]

[1,2,3]Akuntasi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author pagodjaulfa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli daerah, Rasio Keuangan

Keywords:
Financial Performance, Regional Original Income, Financial Ratios

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

In order to achieve the economic development of a country, financing is needed with a fair, transparent and efficient financial distribution system. So it is very important for local governments to pay great attention to the performance of regional financial management. The purpose of this study is based on the formulation of the problems previously mentioned, namely to find out and identify how the ratio of regional financial performance in Gorontalo Regency is. The results of the study show that the ratio of regional financial performance in Gorontalo Regency during the period 2017-2021 shows that all financial ratios have decreased from 2017 to 2020. Then in 2021, it begins to experience improvements in terms of increasing financial performance when viewed from various financial ratios. So that the Gorontalo Regency Government must be able to maximize the potential that exists in the region to be able to improve financial performance which is generally lower than 2017.

ABSTRAK

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi suatu negara maka diperlukan pembiayaan dengan system pembagian keuangan yang adil, transparan dan efisien. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukan rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017 – 2021 menunjukan bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Dari 5 raiso yang di ambil terdapat 3 rasio yang efektif dan 2 rasio yang tidak efektif Sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan yang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan tantangan dan arah kebijakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas, 2014). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangan pembangunan juga mencakup kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif sehingga mampu menopang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Krisis ekonomi 1997 menjadi titik balik penting dalam tata kelola keuangan nasional. Ketika pemerintah tidak mampu membiayai berbagai program pembangunan akibat melemahnya pendapatan, ketahanan ekonomi nasional pun ikut terguncang. Muhadam (2015) menegaskan bahwa kondisi tersebut memperlebar kesenjangan antar daerah dan menguatkan kebutuhan desentralisasi. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta membuka kesempatan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi keuangan lokal sebagai penopang pembangunan.

Penguatan pengelolaan keuangan daerah semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Keberhasilan tata kelola keuangan daerah dapat diukur melalui analisis rasio keuangan pada APBD, yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

Pembiayaan pembangunan yang baik menuntut adanya pengelolaan keuangan yang adil, efisien, serta transparan. Apabila anggaran dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi daerah dapat muncul secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Masihad, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa setiap proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dijalankan sesuai prinsip good governance. Pada konteks Provinsi Gorontalo, perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin penting ketika daerah menghadapi berbagai tantangan seperti melemahnya aktivitas ekonomi dan dampak pandemi COVID-19.

Data Statistik Keuangan (2020) menunjukkan bahwa meskipun total pendapatan Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berfluktuasi. Pada tahun 2017 PAD sebesar Rp190,428,308; turun pada 2018 menjadi Rp147,992,401; kemudian naik menjadi Rp155,465,564 pada 2019; dan kembali meningkat menjadi Rp175,765,940 pada 2020. Kenaikan ini bersifat perlahan dan belum cukup memperkuat posisi keuangan daerah. Selain itu, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 66,80% dari total pendapatan tahun 2020, sementara PAD hanya berkontribusi 11,70% dan pendapatan lain yang sah sebesar 21,50%. Kondisi ini menandakan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 -2020

Jenis Pendapatan Pemerintah	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Juta Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.**190.428.308**	Rp.147.992.401	Rp.**155.465.564**	Rp.**175.765.94(**
Pajak Daerah	Rp.22.180.564	Rp.27.456.459	Rp.31.295.613	Rp.40.688.65
Retribusi Daerah	Rp.5.940.900	Rp.9.099.112	Rp.5.306.381	Rp.6.530.99(
Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.2.921.391	Rp.4.581.761	Rp.5.453.911	Rp.5.453.91
Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.159.385.453	Rp.106.855.069	Rp.113.409.659	Rp.123.092.38
DANA PERIMBANGAN	Rp.**866.050.166**	Rp.**1.002.264.189**	Rp.**988.549.823**	Rp.**1.002.855.23**
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp.12.703.066	Rp.10.620.146	Rp.10.791.585	Rp.10.627.66
Dana Alokasi Umum	Rp.653.986.983	Rp.653.986.983	Rp.675.236.653	Rp.694.578.00
Dana Alokasi Khusus	Rp.199.360.117	Rp.337.657.060	Rp.302.521.585	Rp.297.649.55
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp.**202.994.401**	Rp.**306.795.807**	Rp.**355.139.218**	Rp.**322.737.33**
Pendapatan Hibah	Rp.6.500.277	Rp.54.823.200	Rp.60.506.483	Rp.56.154.15
Dana Darurat	-	-	-	
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.37.094.340	Rp.38.023.438	Rp.45.195.760	Rp.43.298.26
Dana Penyesuaian dan Otonomi KHUSUS	Rp.157.372.168	Rp.211.949.169	Rp.248.935.865	Rp.223.284.91
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.2.025.544	Rp.2.000.000	Rp.500.000	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.2.072	-	Rp.1.110.000	
JUMLAH	Rp.**1.259.472.875**	Rp.**1.457.052.397**	Rp.**1.499.154.605**	Rp.**1.501.358.50**

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Meskipun laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 mengalami pergeseran dan refocusing untuk penanganan COVID-19 (Pomalingo, 2021 dalam read.id). Perubahan tersebut menyebabkan pencapaian kinerja keuangan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana daerah telah mengelola anggaran secara efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan.

Berdasarkan berbagai persoalan dan dinamika tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui indikator rasio keuangan, mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah berdasarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan, serta menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar pertimbangan dalam perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gorontalo selama 90 hari, mulai Agustus hingga November 2022.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, karena penelitian bertujuan menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah melalui data numerik. Menurut Sugiyono (2012), metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan fakta secara aktual sehingga dapat dipahami secara lebih mendalam.

Variabel penelitian terdiri atas lima rasio keuangan, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber dana eksternal, sedangkan Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan merealisasikan pendapatan sesuai potensi riil (Halim, 2012). Rasio Efisiensi mengukur kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya; semakin kecil rasionya, semakin baik kinerjanya (Mardiasmo, 2013). Rasio Keserasian digunakan untuk melihat prioritas belanja daerah, sementara Rasio Pertumbuhan menunjukkan perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun.

Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sedangkan sampelnya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan untuk perhitungan rasio keuangan.

Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, terutama laporan keuangan, PDRB, jumlah penduduk, serta data pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan hasil perhitungan setiap rasio untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah. Prosedur penelitian meliputi observasi awal, penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian hingga tahap ujian akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

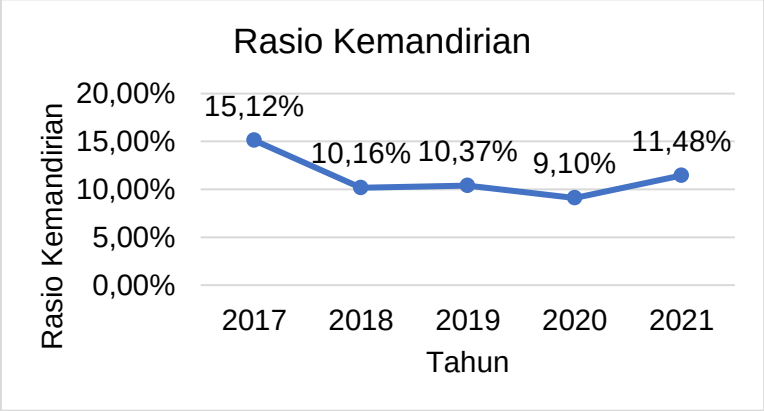
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Ket
2017	Rp.190.428.308	Rp.1.259.472.875	15.12%	Instruktif
2018	Rp.147.992.401	Rp.1.457.052.397	10.16%	Instruktif
2019	Rp.155.465.564	Rp.1.499.154.605	10.37%	Instruktif
2020	Rp.128.153.477	Rp.1.408.587.213	9.10%	Instruktif
2021	Rp.166.605.914	Rp.1.451.878.306	11.48%	Instruktif
Rata-rata	Rp.157.729.132,8	Rp.1.415.229.079	11.15%	Instruktif

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Pada Rasio Kemandirian Kabupaten Gorontalo selama lima tahun berada pada kategori *sangat rendah* dengan kisaran rata-rata hanya 11,15%. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Kemandirian keuangan yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih jauh dari memadai.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai sebagian besar program dan kegiatan pemerintahan. Bahkan pada tahun 2020, rasio ini mencapai titik terendah sebesar 9,10%, menandakan semakin kecilnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bantuan pusat. Ini sejalan dengan pernyataan Halim (2012) yang menyebutkan bahwa rasio di bawah 25% menggambarkan pola hubungan instruktif, di mana pemerintah pusat lebih dominan mengatur karena daerah belum mandiri dalam fiskal.



Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 1. Rasio Kemandirian

Fluktuasi PAD dari tahun ke tahun juga memperlihatkan bahwa daerah belum mampu memaksimalkan potensi pendapatannya. Meskipun terdapat upaya peningkatan penerimaan dari sektor-sektor PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun peningkatan tersebut masih belum signifikan dibandingkan dengan besarnya dana transfer yang diterima. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Medan menunjukkan rasio kemandirian yang jauh lebih tinggi, mencapai rata-rata 36,80% bahkan dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan daerah tersebut, Kabupaten Gorontalo masih memiliki kesenjangan besar dalam kemampuan menciptakan pendapatan asli secara mandiri.

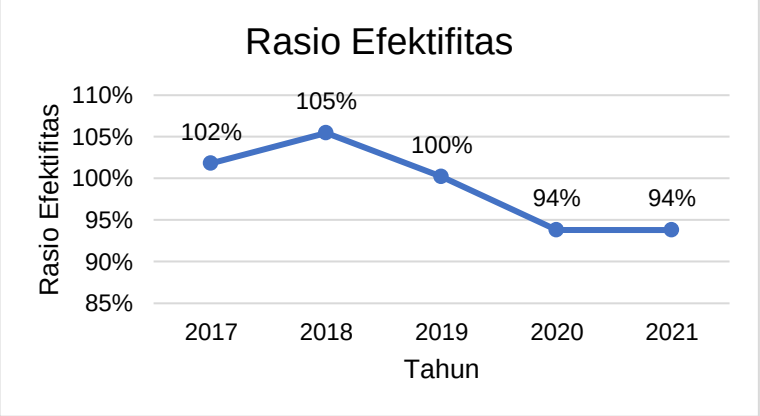
Rasio Efektifitas

Tabel 3. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektifitas	Ket
2017	Rp.1.259.472.875	Rp.1.237.243.997	102%	Efektif
2018	Rp.1.457.052.397	Rp.1.381.594.498	105%	Efektif
2019	Rp.1.499.154.605	Rp.1.496.156.132	100%	Efektif Berimbang
2020	Rp.1.408.587.213	Rp.1.501.358.507	94%	Tidak Efektif
2021	Rp.1.361.878.306	Rp.1.451.878.306	94%	Tidak Efektif
rata-rata	Rp.1.397.229.079	Rp.1.413.646.288	99.02%	TidajkEfektif

Sumber: Hasil Olah Data,2022

Pada Rasio Efektivitas, kondisi Kabupaten Gorontalo selama 2017–2021 menunjukkan kinerja yang berfluktuasi dan tidak konsisten. Pada tahun 2017 efektivitas berada pada angka 102%, dan di tahun 2018 meningkat menjadi 105%, yang berarti pemerintah berhasil melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Namun, capaian tersebut tidak dapat dipertahankan. Rentang tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan efektivitas yang cukup signifikan, sehingga rasio menjadi 94% dan masuk ke dalam kategori tidak efektif. Rendahnya efektivitas pada dua tahun terakhir tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kemampuan SDM dalam pemungutan pajak yang masih terbatas, kurangnya sarana prasarana, hingga rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.



Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 2. Rasio Efektifitas

Selain itu, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang melemah turut memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang menjadi sumber PAD, seperti pajak restoran, hotel, dan jasa lainnya. Ketika daya beli menurun, perputaran ekonomi pun melambat sehingga pendapatan dari sektor pajak ikut terpengaruh. Hal ini selaras dengan teori bahwa efektivitas pendapatan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dibandingkan penelitian-penelitian sejenis di Kota Malang, Tangerang, Manado, dan Sumatera Barat, efektivitas Kabupaten Gorontalo jauh lebih rendah, karena daerah-daerah tersebut mampu mempertahankan efektivitas di atas 105% setiap tahun.

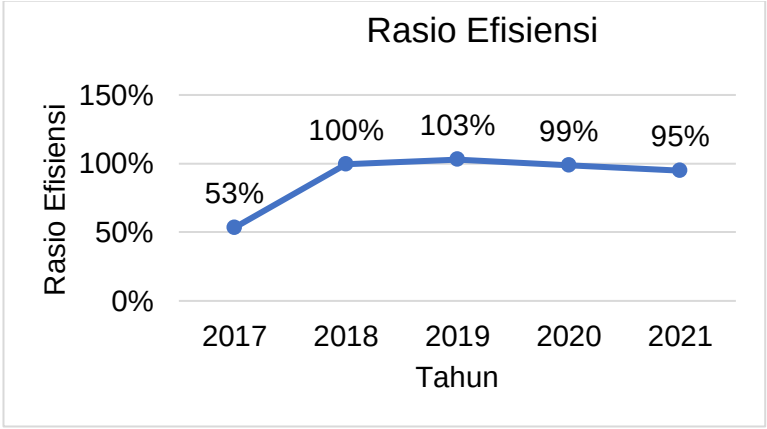
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio efisiensi	Ket
2017	Rp.671.893.453	Rp.1.259.472.875	53%	Efisien
2018	Rp.1.451.790.060	Rp.1.457.052.397	100%	Efisien Berimbang
2019	Rp.1.542.630.737	Rp.1.499.154.605	103%	Tidak Efisien
2020	Rp.1.392.206.507	Rp.1.408.587.213	99%	Efisien
2021	Rp.1.293.956.745	Rp.1.361.878.306	95%	Efisien
Rata-rata	Rp.1.270.495.500	Rp.1.397.229.079	90%	Efisien

Sumber: Hasil Olah Data,2022

Pada Rasio Efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo cukup berhasil dalam mengelola biaya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 90%, hal ini berarti pemerintah daerah telah mampu meminimalkan biaya pemungutan pendapatan secara efektif. Menurut Mardiasmo (2013), semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, rasio 90% yang diperoleh Kabupaten Gorontalo menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi ini merupakan salah satu aspek positif yang perlu dipertahankan, meskipun besarnya PAD belum optimal. Efisiensi yang baik menunjukkan bahwa mekanisme operasional dalam pemungutan pendapatan dikelola secara tepat meski menghadapi keterbatasan fiskal.

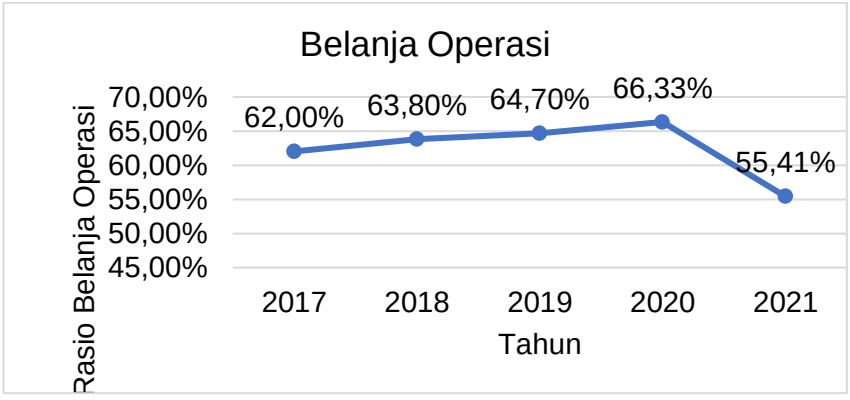


Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 3. Rasio Efisiensi

Rasio Keserasian

1. Rasio Belanja Operasi



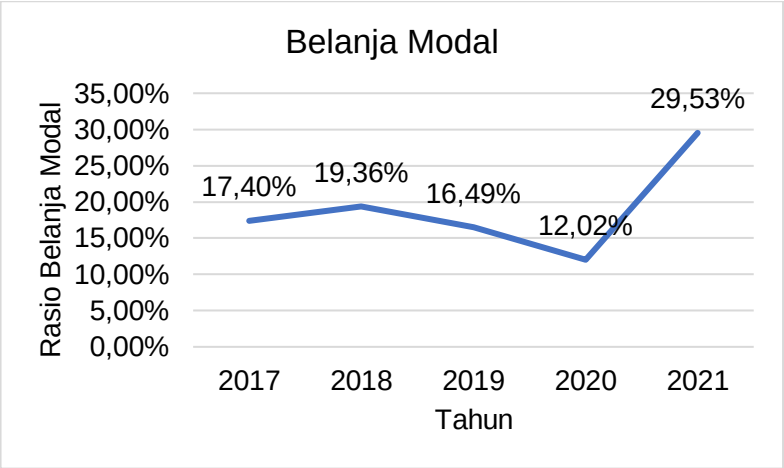
Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 4. Rasio Belanja Operasi

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio belanja operasi daerah mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2017 sebesar 62,00% dan pada tahun 2020 mencapai 66,33%. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 55,41%. Hal ini diakibatkan oleh anggaran belanja

operasional di alihkan untuk pembiaayaan Covid-19. Sehingga terjadi penurunan dalam hal rasio belanja operasi.

2. Rasio Belanja Modal



Sumber: Hasil Olah data, 2021

Gambar 5. Rasio Belanja Modal

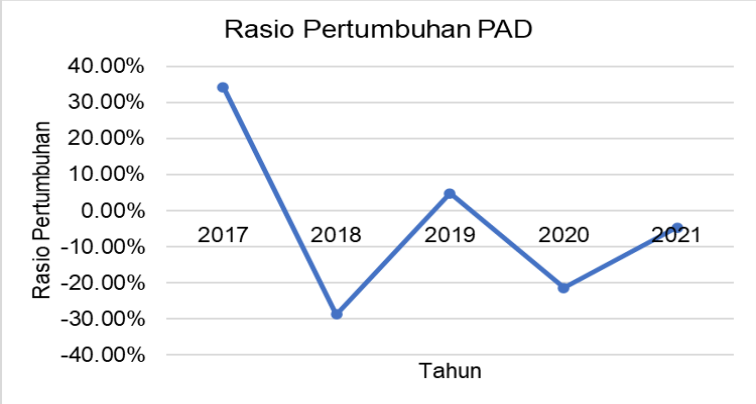
Rasio Pertumbuhan

Tabel 5. Rasio Pertumbuahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD Xn - Xn-1	Realisasi Penerimaan PAD Xn	Rasio Pertumbuhan
2017	Rp.65.157.232	Rp.190.428.308	34.22%
2018	Rp.-42.435.907	Rp.147.992.401	-28.67%
2019	Rp.7.473.163	Rp.155.465.564	4.81%
2020	Rp.-27.312.087	Rp.128.153.477	-21.31%
2021	Rp.-5.685.651	Rp.122.467.826	-4.64%
Rata-rata	Rp.-560.650	Rp.148.901.515	-4.64%

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gorontalo selama 2017–2021 cenderung mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata -4,64%. Pertumbuhan negatif ini menandakan bahwa PAD pada tahun tertentu lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fluktuasi pendapatan yang tidak stabil menunjukkan bahwa potensi PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan dan pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. Penelitian Arumdari (2019) yang menemukan situasi serupa pada Kota Medan menegaskan bahwa pertumbuhan PAD negatif terjadi akibat tidak maksimalnya realisasi pendapatan, baik karena faktor ekonomis maupun kurangnya optimalisasi potensi pendapatan daerah.



Sumber: Hasil Olah data, 2022

Gambar 6. Rasio Pertumbuhan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017 – 2021 menunjukan bahwa beberapa rasio keuangan mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Hasil rasio keuangan Kabupaten Gorontalo: Dari 5 Rasio menurut Halim (2012), terdapat 3 Rasio yang baik atau Efisien dan 3 rasio yang tidak baik atau tidak efisien. Rasio yang baik atau efisien yakni: Rasio Efesiensi, Rasio Keserasian Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan. Dan Rasio yang kurang baik atau tidak efisien yakni: Rasio kemandirian, rasio efektifitas dan Rasio Keserasian Belanja Operasi.

1. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sebesar 11,15% dikategorikan kurang baik sebagaimana berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2012) dimana dibawah 25,00% pola hubungan instruktif atau kriteria rendah sekali. Untuk rasio kemandirian tertinggi pada tahun 2017 dengan tingkat persentase mencapai 15,12%. Jika dibandingkan berdasarkan kriteria rasio kemandirian, pada tahun 2017 Rasio kemandirian memeliki kemampuan yang sangat rendah karena berada di angka 0%-25%. Demikian juga dengan tahun 2018-2021 yang rasio kemandirian berada di bawah 12%.(tidak efisien)
2. Dimana pada tahun 2018 merupakan Rasio Efektifitas yang selama tahun 2017-2021 karena rasio efektifitas keuangan daerah yang tertinggi yakni sebesar 105%. Jika disesuaikan berdasarkan kriteria kinerja keuangan rasio efektifitas daerah dimana pada tahun 2017-2018 memiliki rasio efektif. Akan tetapi pada tahun 2019-2021 rasio Efektivitas dengan kriteria tidak efektif karena di bawah dari 100%(tidak efisien)
3. Diketahui bahwa pada tahun 2017 menunjukan rasio efisiensi terbawah 53% dalam hal ini termasuk dalam kategori efisien, kemudian pada tahun 2018 rasio efisiensi keuangan daerah meningkat menjadi 100% dalam hal ini termasuk dalam kategori efisien berimbang. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi menjadi 103% dan masuk dalam kategori tidak efisien. Setelah itu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 99% dan 95% di

mana pada kedua tahun ini rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kategori efisien. (efisien).

4. Rasio keserasian ini di gunakan 2 Rasio belanja yakni belanja operasi keuangan daerah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 66,33%, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 55,41% (tidak efisien). Rasio keserasian belanja modal keuangan daerah mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 12,03%, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 29,53%(efisien).
5. Rasio Pertumbuhan pada tahun 2020 sempat berada pada titik -21,31% akan tetapi pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan menjadi -4,64%(efisien)

REFERENSI

BPS. Provinsi Gorontalo. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo 2020. CV. Rifaldi

Halim, A. (2012[a]). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Halim, A (2012[b]). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,

Halim, A. (2015). Manajemen Keuangan Bisnis konsep dan Aplikasinya. Jakarta:

Halim, F. (2017), Analisis Laporan keuangan. Bandung Alfabeta Mitra Wacana Media

Labolo, M. (2015). Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor: Ghalia Indonesia,

Mahmud.i (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN: Yogyakarta

Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi.Andi: Yogyakarta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Anggraini, R.D. (2015) "Aalisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektifitas realisasi anggaran pemerintah kota tanggerang tahun 2010-2014".

Erawati, M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2. ISSN: 2302-8556.

Haryanto, A. (2014). "Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2014.

Kaeng, A.R. "Analisis Pendapatan Asli daerah untuk belanja daerah pada pemerinstah kota tomohon". Jurnal Emba., Vol. 3 No. 2 Juni (2015), h.960

Kaunang, C.E. (2016.) Analisis Kinerja Pengelolaanb Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah pada Kota Manado 2010-2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016

Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1

Mahmudi. (2016) Jurusan Akuntansi Feb Universitas Mataram Analisis Belanja Daerah

Oesi, A. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Rindang, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Rochman, S.N. (2015). faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. naska publikasi. universitas muhammadiya Surakarta.

Sambow, D.F. George M. V. Kawung, Avriano Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016

Saputra, D. "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat", Padang: Universitas Negeri Padang, 2014

Sularso dan Restianto. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal PAda Pmerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Sundari dan Rr. Suprantiningrum. (2015). analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi kasus kota semarang tahun 2009-2013). Media ekonomi dan manajemen. Vol. 30 no. 1 januari 2015

Suratno, P.N. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI. 2004. Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.